

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan

1. Pengertian Praperadilan

Praperadilan adalah suatu tindakan atau usaha yang diberikan oleh lembaga Pengadilan Negeri guna melakukan atau memeriksa juga memutus mengenai keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan memutus permintaan ganti kerugian serta rehabilitasi yang perkara pidanannya tidak dapat dilanjutkan ke muka sidang di pengadilan negeri yang diminta oleh tersangka atau yang sudah menjadi terdakwa ataupun pelapor atau keluarganya serta penasehat hukum tersangka pun dapat mengajukan permintaan praperadilan.¹³

Menurut ketentuan pada Pasal 1 butir (10) KUHP menyatakan bahwasannya Praperadilan sendiri adalah kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri guna memeriksa dan juga memutus menurut prosedur yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981("KUHP") tentang:

- a. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*

¹³ Mochamad Anwar, 1989, *Praperadilan*, Jakarta, Ind-Hil-Co, hlm. 25

- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Praperadilan tidak diatur di dalam ketentuan HIR(Herziene Inlands Reglement).

Menurut M. Yahya Harahap, ditinjau pada struktur dan juga susunan peradilan, praperadilan sendiri bukanlah lembaga yang berdiri sendiri. Melainkan Praperadilan hanya suatu lembaga yang ciri dan eksistensinya adalah sebagai berikut:

- a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri dan sebagai lembaga pengadilan hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri;
- b. Praperadilan bukan berada diluar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri;
- c. Administrasi yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada dibawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri; dan
- d. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.¹⁴

Sidang praperadilan sendiri diadakan atas permintaan atau permohonan dari terdakwa atau terdakwa atau dapat juga dari keluarga terdakwa ataupun kuasa terdakwa yang mana sidang ini merupakan suatu forum yang dilakukan secara terbuka, dimana dipimpin oleh seorang hakim atau untuk memanggil para pihak dari penyidik ataupun pihak penuntut umum yang mana telah diduga melakukan suatu upaya paksa agar mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tindakannya

¹⁴ M.Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 3

dihadapan sidang yang bersangkutan tersebut, tujuannya adalah apakah benar proses penangkapan, penahanan, penyidikan itu dilakukan atas dasar beralasan hukum dan berlandaskan pada hukum. Dengan sistem pengujian melalui sidang terbuka ini, maka tersangka atau terdakwa seperti halnya dalam Habeas Corpus Act, dijamin hak asasinya berupa hak dan upaya hukum untuk melawan perampasan atau pembatasan atas kemerdekaan atau kebebasan dimana hal tersebut dilakukan sewenang-wenang oleh para penyidik maupun oleh penuntut umum.¹⁵

Praperadilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri serta diberikan wewenang guna memeriksa dan juga memutus terkait dengan permasalahan atau kasus yang terjadi dalam penggunaan wewenang upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik dan juga oleh Penuntut Umum. Dalam perkara praperadilan biasanya terdapat dua pihak, yaitu pihak Pemohon dan pihak Termohon. Pihak pemohon adalah tersangka, keluarga maupun kuasa hukumnya. Sedangkan pihak termohon adalah penyidik atau jaksa penuntut umum. Pihak pemohon merasa ada aturan ataupun haknya merasa dirugikan oleh Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum, kemudian pemohon mengajukan hal ini ke lembaga praperadilan dalam penyelesaian perkara pidananya yang merasa haknya dirugikan oleh termohon.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak ada atau tidak terdapat mengenai ketentuan yang mana seorang hakim praperadilan

¹⁵ *Ibid.*

dalam melakukan suatu pemeriksaan pendahuluan, proses penggeledahan, maupun penyitaan, dan seterusnya yang sifatnya adalah pemeriksaan pendahuluan. Ia tidak pula menentukan apakah suatu perkara cukup alasan ataukah tidak untuk dapat diteruskan ke pemeriksaan sidang di pengadilan. Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Hukum Acara Pidana didasarkan atas HIR yang dipakai sebagai pedoman saja. Menurut R. Subekti, hukum pidana harus mengatur:

- a. Cara-cara mendapatkan keterangan-keterangan tentang suatu tindak pidana untuk mengetahui siapa pembuatnya dan keadaannya dalam mana perbuatannya dilakukan.
- b. Cara-caranya membuat dan menyelesaikan surat-surat pemeriksaan permulaan.
- c. Cara-caranya menuntut si tersangka di muka hakim.
- d. Bagaimana dilakukannya proses pemeriksaan di hadapan sidang pengadilan sehingga hakim dapat mencapai putusannya.
- e. Bagaimana menjalankan putusannya itu.¹⁶

Sesuai dengan tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lebih baik yang memberi perlindungan kepada hak-hak asasi dalam keseimbangan dengan kepentingan umum, maka dalam KUHP ini terdapat perbedaan yang fundamental dengan HIR, terutama mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman.¹⁷ Menurut penulis dengan

¹⁶ R. Subekti, 1995, *Dasar-Dasar Hukum dan Keadilan*, Jakarta:Soeroeangan, hlm. 107.

¹⁷ Tanusubrot, 1993, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.1.

diadakannya suatu lembaga yang disebut Pra Peradilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka di dalam pemeriksaan pendahuluan.

2. Pengertian Acara Praperadilan

Terkait dengan Acara Praperadilan untuk definisi secara tekstualnya, yaitu adalah suatu pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya suatu proses penangkapan dan/atau proses penahanan (hal ini sesuai dengan Pasal 79 KUHAP), pemeriksaan terkait sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan dan/atau tahapan penuntutan (Pasal 80 KUHAP), juga tentang pemeriksaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan (Pasal 81 KUHAP), terdapat tiga hal tentang praperadilan dimana ditentukan dari beberapa hal berikut:

- a. Tiga hari kerja setelah diterimanya permintaan dari tersangka maupun pihak yang berhak mengajukan, kemudian hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidangnya;
- b. Memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya penangkapan atau penahanan atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar

keterangan baik tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;

- c. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara cepat atau selambat-lambatnya tujuh hari kerja hakim sudah harus menjatuhkan tentang putusannya;
- d. Perkara yang sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur;
- e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh Penuntut Umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru (semua yang tersebut pada butir 1 sampai dengan 5 ini diatur dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP);
- f. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan peradilan dalam ketiga hal tersebut harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya (Pasal 82 ayat (2) KUHAP);
- g. Selain daripada yang tersebut pada butir 6, putusan hakim ini memuat pula diantaranya:

- 1) Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;

- 2) Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- 3) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
- 4) Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.¹⁸

Menurut Hartono, definisi terkait dengan acara Praperadilan, adalah suatu proses persidangan sebelum sidang dengan masalah pokok perkaranya yang akan disidangkan. Maksud dari pengertian perkara pokok ialah perkara materinya atau inti perkara, sedangkan dalam praperadilan proses persidangan hanya menguji proses tata cara penyidikan dan penuntutan, bukan kepada materi substantisial pokok saja. Adapun yang dimaksud dengan materi pokoknya adalah materi perkara tersebut, misalnya perkara yang akan disidangkan adalah terkait korupsi, maka materi pokoknya adalah perkara korupsi.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Hartono, 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progresif)*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hal. 87

Penulis memberikan perhatian sedikit mengenai acara Praperadilan yakni pra peradilan telah menjadi wewenang Pengadilan Negeri seperti kewenangan lainnya dalam memeriksa dan memutus perkara pidana maupun perdata. Hanya saja disini perlu diperhatikan, bahwa macam proses acara pra peradilan bukanlah sebagian dari tugas memeriksa dan memutus perkara (dalam hal ini mengadili) materi pokok perkaranya itu sendiri sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pendapat Hartono.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 1 (satu), Korupsi adalah suatu penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan atau sebagainya untuk kepentingan pribadi atau bagi orang lain. Sedangkan di dunia Internasional pengertian korupsi berdasarkan Black Law Dictionary yang mempunyai makna bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya.²⁰

Melihat dalam arti yang luas, korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri agar memperoleh suatu keuntungan baik pribadi maupun golongannya. Kegiatan memperkaya diri dengan menggunakan jabatan, dimana orang tersebut merupakan orang yang menjabat di departemen swasta maupun departemen pemerintahan.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 249

Korupsi sejatinya dapat timbul dimana-mana serta tidak terbatas dimana dalam hal yang telah dijelaskan diatas, sehingga untuk dapat mempelajari dan juga membuat suatu solusi, kita harus bisa membedakan yang mana diantaranya tentang korupsi atau tentang kriminalitas kejahatan.

Pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PTKP (“Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”) tidak disebutkan pengertian korupsi secara tegas. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.²¹

Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK di atas, dapat disimpulkan ada tiga unsur dari tipikor itu sendiri yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara Pasal 3 menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan memberi hadiah atau janji

²¹ Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut.

Korupsi secara umum diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok tertentu. Dengan demikian secara spesifik ada 3 (tiga) fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extraction*), dan nepotisme (*nepotism*). Kejahatan tipikor pada hakikatnya termasuk ke dalam kejahatan terkait dengan ekonomi, hal ini bisa dibandingkan dengan anatomi kejahatan ekonomi sebagai berikut:

1. Penyamaran atau bisa disebut dengan sifat yang tersembunyi dan juga terdapat adanya maksud tujuan kejahatan;
2. Keyakinan diri si pelaku terhadap perbuatan pembodohan atau kecerobohan dari diri korban; dan
3. Penyembunyian terkait pelanggaran.²²

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana ialah suatu pengertian menurut hukum atau yuridis, berbeda halnya dengan istilah “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Dari berbagai sumber dapat kita ketahui, bahwasannya istilah dari tindak

²² Jur Andi Hamzah, 2014, *Pemberantasan Korupsi : Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 29

pidana sejatinya merupakan istilah atau sebutan yang bersumber dari terjemahan kata “*strafbaarfeit*” menurut bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* ini kemudian diterjemahkan kembali di dalam berbagai terjemahan bahasa Indonesia.²³

Menurut Moeljatno, pada intinya perbuatan tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar di dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu gambaran yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi terhadap istilah hukum, maka bukanlah suatu hal yang gampang untuk memberikan definisi atau pengertian kepada istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan agar dapat memahami pengertian pidana sebagai suatu delik (pidana), sedangkan pembedaan sendiri berkaitan dengan prinsip-prinsip pembedaan penganan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan juga bahwasannya, pidana adalah merupakan suatu sebutan yuridis yang memiliki arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “*straf*” yang dapat diartikan sebagai “hukuman”.²⁴

Sedangkan menurut simons, istilah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sementara menurut van Hammel, yang disebut dengan *strafbaarfeit* ialah keadaan atau kelakuan

²³ Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia : Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hal. 101

²⁴ Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. hal. 37

seseorang yang dirumuskan dalam wet yang sifatnya melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²⁵

Mengutip dalam buku Tongat, tersimpul bahwa *strafbaarfeit* pada dasarnya mengandung pengertian sebagai berikut :

- Bahwa kata *feit* dalam istilah *strafbaarfeit* mengandung arti melakukan atau tingkah laku
- Bahwa pengertian *strafbaarfeit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan atau yang melakukan kelakuan tersebut.

Apa yang yang disebut pada poin pertama, menurut Moeljatno pengertiannya berbeda dengan perbuatan dalam istilah pidana. Sebab menurut Moeljatno perbuatan mengandung arti kelakuan dan akibat, bukan hanya kelakuan saja. Sementara apa yang disebut pada poin kedua, maknanya juga berbeda dengan perbuatan pidana, sebab dalam istilah perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana.

Disini menurut penulis terkait dengan beberapa penggunaan istilah tersebut tidak menjadi permasalahan sepanjang penggunaan istilah tersebut disesuaikan dengan konteksnya dan dapat dipahami maknanya. Sejalan dengan itu menurut penulis pengertian dari istilah tindak pidana

²⁵ Tongat, Op.cit. hal. 103

lebih mudah dipahami dari pendapat Moelajtno, dimana dijelaskan bahwa perbuatan pidana hanya menunjuk pada sifat perbuatannya saja. Persoalan apakah orang yang melanggar itu kemudian benar-benar dipidana atau tidak, hal ini juga tergantung pada hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya.

Setelah kita mengetahui sedikit mengenai beberapa definisi tentang Tindak Pidana itu sendiri, selanjutnya juga perlu kita ketahui tentang unsur-unsur dari tindak pidana itu sendiri, dimana suatu perbuatan tindak pidana baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, dimana unsur dari tindak pidana adalah sebagai berikut :

1) Unsur Objektif

Yang dimaksud dengan unsur ini ialah yang sifatnya berasal dari luar diri si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan pelaku tersebut harus dilakukan. Unsur ini terdiri dari:

- Sifat melanggar Hukum.
- Kualitas dari si pelaku.
- Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²⁶

²⁶ *Ibid.*

2) Unsur Subjektif

Unsur subyektif ialah unsur yang terdapat pada diri si pelaku itu sendiri, dimana dalam hal ini di hubungkan dengan diri pelaku kejahatan itu sendiri dan juga termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terdapat di dalam batin si pelaku. Unsur ini sendiri terbagi dari :

- Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
- Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- Merencanakan terlebih dahulu seperti yang tercantum di dalam ketentuan pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan adanya perencanaan terlebih dahulu.
- Perasaan takut sebagaimana yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 308 KUHP.²⁷

b. Pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan

²⁷ *Ibid.*

negara. Kata korupsi berasal dari kata latin *corruption* atau *corrupt*. Kemudian muncul dalam berbagai bahasa Eropa seperti Prancis yaitu *corruption*. Bahasa Belanda *corruptie* dan muncul dalam pembenamaan bahasa Indonesia yang selama ini kita dengar dengan istilah korupsi.²⁸

Tindak pidana korupsi merupakan golongan dari tindak pidana khusus karena hal ini dilakukan orang yang khusus maksudnya, ialah subyek dan pelakunya khusus dan perbuatan yang dilakukannya khusus, serta akibat yang dapat ditimbulkan oleh adanya tindak pidana korupsi harus di sikapi dengan serius dan khusus. Sehingga untuk itu perlu di kembangkan peraturan-peraturan khusus sehingga nantinya diharapkan dapat menjangkau semua perbuatan pidana yang merupakan tindak pidana korupsi karena hukum pidana pada umumnya tidak sanggup untuk menjangkau terkait tindak pidana korupsi.

Adapun mengenai pengertian tindak pidana korupsi yang secara eksplisit dijelaskan menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian korupsi yaitu :

- 1) Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat (1)).

²⁸ *Ibid.*

- 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
- 3) Setiap orang yang member hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingati kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).
- 4) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15).
- 5) Setiap orang di luar Wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 16).²⁹

Menurut Pendapat penulis disini, penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, unsur dari melawan hukum disini mencakup perbuatan tersebut yang mana dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat atau diancam dengan pidana. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri sendiri disini adalah

²⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dengan cara yang tidak benar atau dengan cara melanggar hukum. Tentunya perbuatan ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, perbuatan yang dimaksud di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwasannya untuk memperkaya diri sendiri tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi orang lain suatu korporasi.

Lebih lanjut perlu kita ketahui juga mengenai pengertian dari tindak pidana korupsi menurut para ahli, banyak pula mengenai definisi dari pengertian tindak pidana korupsi menurut para pakar diluar sana, akan tetapi penulis hanya akan memasukkan beberapa pendapat ahli yang mewakili, diantaranya pendapat dari H. Baharuddin Lopa, yang mengatakan :

*“ Tipikor adalah suatu situasi tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan manipulasi dan tentang perbuatan melawan hukum yang mana dapat merugikan keuangan negara atau dalam hal ini perekonomian negara, juga dapat merugikan kesejahteraan atau kepentingan khalayak umum. Perbuatan mana yang dapat merugikan perekonomian negara adalah perbuatan korupsi dalam bidang materil, sedangkan tipikori dalam bidang politik adalah dapat berwujud manipulasi pemungutan suara yang dilakukan dengan cara penyuapan, intimidasi atau adanya paksaan dan juga campur tangan dimana nantinya dapat mempengaruhi kebebasan dari memilih komersial pemungutan suara yang terdapat pada lembaga legislatif atau terdapat pada keputusan yang sifatnya administratif dalam bidang pelaksanaan pemerintahan”.*³⁰

³⁰ H. Baharuddin, 1997, *Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal. 6

Menanggapi pendapat dari H. Baharuddin diatas, dapat penulis jelaskan bahwa yang disebut dengan tindak pidana korupsi adalah perbuatan tipu daya dengan melawan hukum yang mana perbuatan tersebut nantinya berdampak pada kerugian perekonomian negara dalam hal materil, sedangkan dalam hal politik menurut beliau yang dimaksud korupsi adalah bentuk tipu daya dengan cara manipulasi pemungutan suara. Dalam bidang politik menurut penulis tindak pidana korupsi terjadi apabila terdapat calon pasangan dari partai yang mengusung yang melakukan tindakan penyuapan kepada beberapa pihak. Tentunya hal ini penulis sependapat dengan ahli bahwa ini juga dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi walaupun tidak secara langsung menimbulkan dampak pada perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi tentunya memiliki unsur-unsur sebagaimana tindak pidana lainnya, unsur dari tindak pidana korupsi ini dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;*
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena alasan jabatan atau kedudukannya; dan*
- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.*³¹

³¹ *Ibid.*

Menurut hemat penulis disini suatu tindak pidana korupsi baru dapat dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi apabila telah memenuhi ketiga unsur sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Apakah kemudian dengan tidak dipenuhinya salah satu unsur kemudian tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi, disini penulis coba melihat dari substansi pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana pada intinya dalam perbuatan seseorang yang telah diduga melakukan tindak pidana korupsi ini setidaknya harus termuat tiga unsur tersebut, sehingga apabila dalam segi unsur dapat merugikan keuangan negara tidak dapat dipenuhi maka akan sedikit sulit dalam menentukan apakah layak perbuatan tersebut dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut pandangan dari sudut hukum, definisi terkait dengan korupsi secara gamblang telah dijelaskan secara jelas dan rinci dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal dalam UU PTPK tersebut menerangkan secara jelas mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena perkara korupsi. Ketiga puluh jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 7 jenis

utama tindak pidana korupsi dimana dapat mewakili atau memberikan gambaran terkait jenis pidana korupsi yang biasa terjadi di Indonesia, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1) Kerugian Keuangan Negara

Unsur "dapat merugikan keuangan negara" seharusnya diartikan secara terang sebagai merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan yang secara langsung dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara. Hal tersebut juga dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang menyatakan kata 'dapat' sebelum frasa merugikan keuangan atau perekonomian negara ini menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yang mana artinya adanya tindak pidana korupsi cukup hanya dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam Undang-Undang bukan dengan timbulnya akibat.³²

Sehingga disini penulis berpendapat bahwasannya perbuatan korupsi dapat dilihat dengan jelas apabila pelaku korupsi tersebut telah menyebabkan sejumlah kerugian terhadap perekonomian negara secara nyata.

³² Andre, *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, dalam <http://pencegahankorupsi.blogspot.com>, diakses tanggal 13 November 2018

2) Suap-Menyuap

Agar dapat mengetahui mengenai tindak pidana korupsi dalam bentuk suap-menyuap dapat kita temui penjelasannya secara jelas dalam ketentuan Pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang No. 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Pasal 2

"memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum."

- Pasal 3

"menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum."³³

Akan tetapi disini penulis perlu memberikan sedikit pendapat bahwasannya terkait dengan tindak pidana korupsi penyuapan sangat berbeda dengan tindak pidana korupsi pemerasan, Karena dalam hal tindak pidana korupsi "pemerasan" seorang pegawai negeri atau penyelenggara negaralah yang sangat berperan aktif meminta secara langsung kepada orang lain. Hal inipun Sangat berbeda pula dengan tindak pidana korupsi gratifikasi Karena

³³ *Ibid.*

apabila “gratifikasi” seorang pegawai negeri sipil atau dalam hal ini adalah penyelenggara Negara tidak mengetahui jika akan diberi sejumlah uang atau pun benda serta hadiah lainnya, tidak ada kata deal seperti tindak pidana korupsi “suap”. Tindak pidana korupsi dalam hal suap menurut Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Suap menyebutkan bahwa yang disebut penyuapan adalah apabila seseorang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri dengan maksud tertentu yang berlawanan dengan tugas dari si pegawai negeri tersebut.

3) Penggelapan dalam Jabatan

Penggelapan adalah suatu kejahatan pidana yang mana unsur dari perbuatannya hampir sama dengan pencurian biasa di dalam pasal 362 KUHP. Bedanya adalah apabila pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan orang yang tidak berhak memiliki benda tersebut (pencuri) dan masih harus ‘diambilnya’, sedangkan dalam penggelapan waktu dimilikinya barang/benda itu sudah ada di tangan si pembuat akan tetapi diperolehnya benda tersebut tidak dengan jalan kejahatan.³⁴ Kemudian yang dimaksud dengan Penggelapan dalam jabatan sebagaimana maksud dari rumusan dalam Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merujuk kepada Penggelapan dengan

³⁴ *Ibid.*

Pemberatan, yakni maksudnya adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang atau pihak dalam hal ini bersifat individual yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (lihat Pasal 374 KUHP).³⁵

Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa penggelapan dalam jabatan berbeda halnya dengan delik penggelapan biasa dalam Pasal 372 KUHP akan tetapi disini yang perlu digaris bawahi adalah penggelapan dalam jabatan adalah penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan seseorang, maksudnya adalah karena jabatan seseorang itu ia diberi upah guna melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya, upah tersebut lah yang disebut sebagai penggelapan dalam jabatan. Penulis juga menyimpulkan bahwsannya penggelapan dalam jabatan berbeda dengan tindak pidana korupsi penyuapan, sebab apabila penyuapan adalah suatu pemberian kepada seseorang yang karena jabatannya untuk melakukan sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu. Sedangkan dalam hal penggelapan dalam jabatan seseorang atas jabatannya diberikan upah guna melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan orang tersebut. Jadi penggelapan secara pengertiannya tidak bisa kita samakan dengan yang dinamakan tindak pidana korupsi penyuapan, walaupun secara makna kedua jenis tipikor ini hampir sama secara pengertiannya.

³⁵ *Ibid*

4) Pemerasan

Pemerasan bila dilihat berdasarkan pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ialah :

“pemerasan adalah tindakan/ perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.”³⁶

Jadi sebagaimana kita ketahui dalam uraian sebelumnya penulis berpendapat bahwa tindak pidana korupsi pemerasan berbeda dengan tindak pidana korupsi penyuapan dan juga berbeda dengan tindak pidana korupsi gratifikasi, hal ini dikarenakan apabila dalam peristiwa tindak pidana korupsi pemerasan yang terlihat berperan secara aktif adalah pegawai negeri sipil itu sendiri atau penyelenggara negara yang meminta bahkan melakukan tindakan pemerasan kepada masyarakat atau pihak yang diinginkan oleh pegawai negeri itu, dimana biasanya yang menjadi korban adalah warga masyarakat yang memerlukan pelayanan atau bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara tersebut. Ini dikarenakan adanya faktor ketidak mampuan secara materiil atau secara keuangan dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan (*service*) atau bantuan

³⁶ Lihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara, sehingga dari sinilah muncul yang namanya tindak pidana korupsi “pemerasan”.

5) Perbuatan Curang

Guna mengetahui dengan seksama unsur daripada perbuatan curang dalam tindak pidana korupsi, dapat kita lihat atau jumpai penjelasannya secara eksplisit dalam rumusan pasal 7 dan pasal 12 huruf h UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana diantaranya sebagai berikut :

– Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi :

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;*
- b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;*
- c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau*
- d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.*³⁷

³⁷ Ibid.

- Pasal 7 ayat 2, yang berbunyi :

“Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.³⁸

- Pasal 12 huruf h, yang berbunyi :

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”³⁹

Jadi apabila dilihat dari ketiga Pasal diatas, penulis berpendapat bahwasannya perbuatan curang yang digolongkan sebagai tindak pidana korupsi adalah keadaan dimana seorang pegawai negeri saat menjalankan tugasnya menggunakan fasilitas milik negara dengan hak pakai seolah-olah sesuai dengan undang-undang yang mengatur, hal ini tentunya dapat merugikan hak orang lain, padahal perbuatan pegawai negeri tersebut telah bertentangan dengan undang-undang. Perbuatan tidak sebatas dari hal tersebut melainkan banyak perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan curang seorang pegawai negeri dengan menggunakan jabatannya untuk memiliki atau bahkan menggunakan fasilitas milik negara yang tentunya melanggar ketentuan perundang-undangan.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

6) Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Yang dimaksud dengan istilah benturan kepentingan dalam pengadaan barang ataupun jasa pemerintah adalah keadaan atau suatu kondisi di mana seorang Pegawai Negeri yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada untuk memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dalam hal ini dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Benturan kepentingan ini tentunya terjadi juga sebab dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor, dimana faktor tersebut ialah sebagai berikut :

- a. Kekuasaan dan kewenangan Pegawai Negeri;
- b. Rangkap Jabatan;
- c. Hubungan afiliasi;
- d. Gratifikasi;
- e. Kelemahan sistem organisasi; dan
- f. Kepentingan pribadi.⁴⁰

Sehingga dapat penulis simpulkan disini yang dimaksud dengan benturan kepentingan ialah situasi dimana seorang penyelenggara negara atau dalam hal ini pegawai negeri yang mendapatkan kekuasaan dan juga wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang memiliki atau patut diduga memiliki

⁴⁰ Andre, Loc.cit

kepentingan bagi pribadinya atas setiap penggunaan wewenangnya yang dimiliki, sehingga dapat mempengaruhi kinerja yang seharusnya. Penjelasan penulis diatas adalah berhubungan dengan penyelenggara negara yang melakukan praktik tindak pidana korupsi. Akan tetapi sesungguhnya, tidak hanya pada pejabat negara, melainkan siapapun yang memiliki kekuasaan di sektor perusahaan swasta sekalipun memiliki potensi benturan kepentingan, sehingga dapat diduga pula mereka pun melakukan penyimpangan termasuk korupsi dalam arti luas. Kepentingan yang dimaksud di sini tidak hanya kepentingan pribadi, namun termasuk juga dengan kepentingan golongan maupun pihak-pihak lainnya.

7) Gratifikasi

Dalam penulisan tugas akhir ini yang menjadi titik tolak penulis untuk meneliti lebih lanjut terkait dugaan perkara tindak pidana korupsi khususnya yaitu terkait dengan gratifikasi. Secara umum pengertian gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan (*fee*), hadiah uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya dengan adanya maksud dan tujuan tertentu. Dari pengertian diatas akan menjadi sempurna apabila dilihat dari segi Undang-undang yang mengaturnya, sehingga akan dipaparkan pengertian dari gratifikasi secara jelas sesuai dengan yang tercantum dalam

ketentuan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dirumuskan sebagai berikut :

- Pasal 12 B ayat (1) :
“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. *yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;*
 - b. *yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.”⁴¹*
- Pasal 12 B ayat (2) :
“Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”⁴²

Jadi menurut hemat penulis, terkait dengan tindak pidana korupsi dalam hal gratifikasi berbeda dengan tindak pidana korupsi penyuapan dan juga pemerasan sebagaimana yang dijelaskan diatas. Apabila di dalam tindak pidana korupsi gratifikasi tidak terdapat adanya kesepakatan tentang berapa besar nilai uang atau benda berharga yang akan diberikan, namun Negara lah yang menerima gratifikasi dari pihak yang tentunya memberikan barang atau uang

⁴¹ Lihat Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁴² *Ibid.*

tersebut dengan maksud dan tujuan tertentu. Akan tetapi perlu diketahui dalam tindak pidana korupsi suap telah terjadi adanya kesepakatan di antara pemberi suap dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap, yaitu kesepakatan mengenai berapa besar uang atau benda dan dimana uang atau benda berharga tersebut diserahkan, serta siapa dan kapan uang atau benda berharga itu diserahkan.

C. Tinjauan Umum tentang Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan. Menurut pendapat Lilik Mulyadi mengenai pengertian putusan hakim adalah :

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.”⁴³

Menurut ketentuan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

⁴³ Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktes pradilan*, Jakarta, Mandar Maju, hal 127

Berdasarkan rumusan KUHAP tersebut putusan hakim dapat digolongkan ke dalam 2 jenis yaitu:

a. Putusan akhir

Putusan ini dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. Maksud dari pokok perkaranya selesai diperiksa adalah sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan proses-proses berupa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua majelis kepada terdakwa untuk mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan serta pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

b. Putusan sela

Berdasarkan pada Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu dalam penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/ penuntut umum. Penetapan atau putusan sela ini mengakhiri perkara apabila terdakwa dan penuntut umum menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut. Akan tetapi, secara material perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila perlawanan dari penuntut umum oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Dalam hal ini melihat dari kedua macam putusan diatas, putusan terkait pra peradilan digolongkan dalam putusan yang mana. Mengutip pendapat Soeparmono bahwa putusan pra peradilan walaupun yang mencakup sah atau tidaknya suatu penghentian peyidikan atau penuntutan, juga bukan merupakan atau bukan termasuk dapat digolongkan sebagai putusan akhir walaupun dapat dimintakan banding. Sehingga Putusan akhir tentang hal tersebut terdapat di pengadilan negeri. Oleh karenanya, apapun yang akan diputus oleh praperadilan adalah hal yang khas, spesifik dan mempunyai karakter tersendiri, sebab dalam hal ini hakim hanya memiliki tugas dan juga wewenang untuk menjadi sarana pengawasan yang horinsontal guna menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran (Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP).⁴⁴ Sehingga menurut hemat penulis disini putusan praperadilan bukan termasuk putusan akhir, terkait apakah putusan tersebut dapat inkrah pengadilan negeri lah yang memutuskan terkait hal tersebut bukan hakim yang memeriksa pra peradilan itu.

Hakim dalam menentukan hukuman diharapkan berpandangan tidak hanya tertuju apakah putusan itu sudah benar menurut hukum, melainkan juga terhadap akibat yang mungkin timbul, dengan berpandangan luas seperti ini maka hakim berkemungkinan besar mampu untuk menyelami kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat danjuga akan lebih dapat memahami serta meresapi makna dari putusan yang dijatuhkan, dalam dunia peradilan

⁴⁴ R. Soepormo, 2004, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Mandar Maju, Bandung, hal 13

dibedakan antara putusan dan penetapan hakim. Putusan dalam pengertian bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah vonnis, sedang yang dimaksud dengan penetapan hakim menurut bahasa Belanda ialah beschikking. Putusan hakim dalam acara pidana adalah diambil untuk memutusi suatu perkara pidana, sedangkan penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan, biasanya dalam perkara perdata seperti pengangkatan wali atau pengangkatan anak.²² Pengertian putusan terdapat dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Adapun pengertian Putusan Hakim dari para ahli sangatlah banyak, akan tetapi untuk memaksimalkan penulisan penulis, maka penulis hanya memasukkan beberapa saja, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Lilik Mulyadi

Dengan berlandaskan pada visi teoritik dan praktik maka “putusan pengadilan” itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.”⁴⁵

⁴⁵ Ibid. Lilik Mulyadi, Hal. 130

2. Laden Marpaung

Pengertian “putusan hakim” menurut Laden Marpaung bahwa:

“Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun tulisan.⁴⁶

Sehingga dari pengertian putusan hakim menurut pendapat kedua ahli diatas, dapat penulis simpulkan, bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim sejatinya adalah suatu putusan yang mana diucapkan oleh hakim yang karena jabatannya dalam suatu persidangan, substansi daripada putusan hakim pengadilan adalah terkait dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari awal mula persidangan hingga tahapan akhir, dimana pertimbangan hukum tersebut secara tersurat dimuat dalam bentuk tulisan dan dibacakan di muka persidangan. Putusan Hakim merupakan tindakan atau langkah akhir dari tugas Hakim di dalam persidangan, dimana hakim akan menentukan apakah terdakwa itu dapat di hukum atau tidak, jadi putusan Hakim adalah suatu pernyataan dari seorang hakim pengadilan dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap (*inchracht*). Lebih lanjut penulis berpendapat sejatinya Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu penemuan dalam menemukan hukum, dimana hakim akan menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum mengenai setiap peristiwa atau suatu perkara yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum.

⁴⁶ Ibid.

D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Sebelum melihat definisi pertimbangan hakim, penulis terlebih dulu menyatakan bahwa pertimbangan hakim berbeda dengan pertimbangan hukum hakim, perbedaan ini akan kita temukan dalam pemaparan definisi masing-masing, dimana yang dimaksud dengan pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁴⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan pertimbangan hukum oleh hakim adalah Pertimbangan hukum dimana adalah suatu tahapan dari majelis hakim untuk mempertimbangkan fakta atau kebenaran faktual yang dapat terungkap selama proses persidangan berlangsung, fakta tersebut bisa timbul dari dakwaan, tuntutan, maupun eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan beberapa alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang memenuhi persyaratan formil dan juga persyaratan materil, yang disampaikan dalam pembuktian dan juga pledoi.

⁴⁷Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.140

Di dalam pertimbangan hukum oleh hakim dicantumkan juga terkait dengan pasal yang terdapat dari peraturan hukum yang mana dijadikan sebagai dasar di dalam menjatuhkan putusan tersebut.⁴⁸

Dalam pelaksanaan pemeriksaan pada suatu perkara perlu adanya suatu pembuktian, yang mana hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan di dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahapan yang paling penting dalam proses pemeriksaan di persidangan. Pembuktian dalam hal ini bertujuan sebagai cara guna memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil bagi masyarakat. Hakim tidak mungkin dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata mengenai persituasinya.⁴⁹

Tugas utama seorang hakim di dalam mengadili perkara pidana adalah melakukan kegiatan yuridis, tidak sekedar melakukan silogisme belaka. Hakim ikut serta dalam pembentukan hukum, dan bukan pula secara objektif seperti yang diciptakan oleh pembentuk undang-undang yang abstrak, akan tetapi menerapkan teks Undang-Undang yang abstrak kedalam suatu peristiwa kongkret. Proses menerapkan teks Undang- Undang yang bersifat umum dan abstrak kedalam peristiwa yang kongkret pada perkara hukum pidana, hakikatnya merupakan kegiatan membaca dan menafsirkan teks Undang-Undang yang bersifat umum dan abstrak kedalam peristiwa kongkret

⁴⁸ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, hal. 144

⁴⁹ Mukti Arto, Op.cit hal. 141

sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Penafsiran hukum ini merupakan kegiatan yang mutlak terbuka untuk dilakukan, sejak hukum di konsepskan sebagai teks Undang-Undang tertulis, sehingga muncul adagium “membaca hukum adalah menafsirkan hukum”.⁵⁰

Tugas seorang hakim yang berkaitan dengan penerapan teks Undang-Undang ke dalam peristiwa kongkret. Disinilah terletak kebebasan hakim dalam peristiwa perkara pidana sebagai kegiatan penafsiran hukum. Kegiatan menafsirkan teks Undang-Undang ke dalam peristiwa kongkret pada hakikatnya merupakan kegiatan penilaian hukum, yaitu produk proses pemaknaan akal-budi dan hati nurani terhadap hasil persepsi manusia tentang situasi kemasyarakatan dalam kerangka pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan keyakinan etis dengan nilai-nilai yang di anut. Kegiatan penilaian hukum mencari nilai-nilai dan makna yang tersembunyi dalam teks Undang-Undang, yaitu nilai-nilai *justice*, *utility*, *dolmatigheid*, *bilijkheid*, sehingga setiap kali membaca teks peraturan, maka harus mencari makna lebih dalam yang ada di belakang peraturan tersebut.⁵¹

Kebebasan hakim dalam menafsirkan hukum merupakan kegiatan yang bersifat individual. Kebebasan hakim sebagai ekspresi intelektual dan moral yang bersumber dari individu hakim memerlukan persyaratan kompetensi dan integritas tinggi dalam rangka menggali makna-makna tersembunyi di balik teks Undang- Undang. Terdapat beberapa persyaratan untuk menjamin

⁵⁰ Satjipto Raharjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006, hlm. 163

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 169

kompetensi dan integritas hakim agar tetap dipercaya masyarakat; *Pertama*, sejauh mana hakim bisa bekerja dengan objektif, apakah hakim yang di konstruksikan sebagai manusia bebas (kebebasan hakim) tidak bias atau berat sebelah, dan apakah senantiasa berpihak pada kebenaran. *Kedua*, apakah benar hakim yang baik, secara sadar atau tidak sadar tidak akan di pengaruhi sikap *prejudice*, disebabkan latar belakang sosial politiknya ketika memutus perkara, padahal seharusnya bersikap objektif dan imparsial. *Ketiga* apakah sikap bisa mempengaruhi cara hakim dalam memahami kedudukan dan fungsinya, karena setiap mengadili perkara akan terjadi pro dan kontra.⁵²

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Dasar Hakim Peradilan di dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan dengan teori-teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga nantinya akan didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek secara hukum. Salah satu cara guna mencapai kepastian hukum pada kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang pada hakikatnya melalui putusannya dapat menjadi suatu tolak ukur agar dapat tercapainya suatu kepastian hukum.

Hal ini secara tegas dicantumkan dalam ketentuan Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana kekuasaan kehakiman ialah “*suatu kekuasaan negara yang merdeka untuk*

⁵² Jimly Assidhiqie, 2009, dalam Luhut Pangaribuan, “*Lay Judges & Hakim Ad Hoc, Studi Teoritis mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*”, Jakarta, Papas Sinar Sinanti, hlm, 188.

*menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.*⁵³

Kekuasaan Kehakiman adalah salah satu kekuasaan yang merdeka dimana dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwasannya kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali terdapat hal-hal sebagaimana disebut di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan ideology negara yaitu Pancasila, sehingga putusannya diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia. Kebebasan hakim disini perlu juga dijelaskan secara tegas bahwasannya posisi hakim yang tidak memihak pada siapapun (*impartial judge*) sesuai dengan ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Pengertian dari kata “tidak memihak” di sini haruslah tidak harfiah, sebab di dalam menjatuhkan putusan hakim harus memihak pihak mana yang benar. Lebih tepatnya pada perumusan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman : “*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang*”.⁵⁴

Dalam hal hakim melakukan pertimbangan hukum sebelum dirinya menjatuhkan putusan, terdapat dua macam pertimbangan yang akan dilakukan

⁵³ *Ibid*, hal 142

⁵⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

oleh seorang hakim peradilan, dimana terdapat pertimbangan yang bersifat Yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis. Berikut ini adalah penjelasan mengenai dua macam pertimbangan hakim tersebut :

1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang mana didasari oleh fakta-fakta yuridis yang terungkap atau yang diketahui di dalam maupun pada saat proses persidangan dan oleh undang-undang telah diatur sebagai suatu hal yang harus ada atau yang dimuat dalam putusan hakim. Yang dimaksud dengan Pertimbangan yang bersifat yuridis dalam hal ini adalah seperti Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan dari para saksi dan terdakwa, barang bukti, serta pasal-pasal di dalam peraturan hukum pidana.⁵⁵ Lebih lanjut penulis akan memaparkan secara rinci sebagaimana berikut dibawah ini :

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan dari JPU merupakan dasar hukum dalam hukum acara pidana hal ini berdasarkan pada saat itulah pemeriksaan di persidangan dapat dilakukan/dimulai. Dakwaan selain berisikan mengenai identitas terdakwa juga berisi mengenai uraian tindak pidana yang didakwakan oleh JPU dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan secara jelas dan terang.⁵⁶

⁵⁵ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Yogyakarta, hal. 115.

⁵⁶ *Ibid.* hal. 124-125

Perumusan mengenai dakwaan didasarkan pada hasil dari pemeriksaan pendahuluan yang disusun baik secara tunggal, kumulatif, alternatif, ataupun subsudair. Dakwaan yang disusun secara tunggal dilakukan apabila seorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan pidana saja, misalnya terkait dengan kasus pencurian (biasa) yang tertera pada Pasal 362 KUHP. Namun, apabila orang tersebut selain melakukan pencurian biasa, kemudian dia melakukan tindakan kekerasan kepada korbannya, maka dalam hal ini dakwaan akan disusun secara kumulatif, artinya terdakwa didakwa dua macam pidana (delik) sekaligus, yaitu pencurian biasa dan penganiayaan. Oleh karena itu, dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan I, II, III dan seterusnya.

b. Keterangan Terdakwa

Dalam praktiknya keterangan terdakwa sering pula dinyatakan dalam bentuk pengakuan dari sang terdakwa dan penolakan baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga kerap kali merupakan sebuah jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun dari pihak penasihat hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menggunakan sebutan “keterangan terdakwa” bukan “pengakuan terdakwa” seperti yang digunakan di dalam HIR (*Herzien Indlandsch*

Rehlement). Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktik, boleh juga dinilai sebagai alat bukti selama pengakuan tersebut benar adanya.⁵⁷

Terkait dengan pengaturan mengenai keterangan terdakwa dapat kita jumpai dalam KUHAP tepatnya pada Pasal 184 butir e, dimana Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa ialah suatu keterangan yang dinyatakan oleh terdakwa di muka persidangan mengenai perbuatan yang telah ia lakukan atau mengenai apa yang ia ketahui sendiri atau dapat juga dialami sendiri oleh diri terdakwa.

c. Keterangan Saksi

Salah satu bagian terpenting di dalam proses pembuktian dalam persidangan yang harus diperhatikan oleh setiap hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Menurut Pasal 184 KUHAP butir a keterangan saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti yang konkret sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah di depan hakim pengadilan. Keterangan saksi yang diucapkan dalam muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran/karangan saja atau hasil rekayasa yang diperoleh dari

⁵⁷ *Ibid*, hal 127

orang lain disebut dengan kesaksian *testimonium de auditu*⁵⁸, keterangan ini pada hakikatnya tidak dapat dinilai atau dijadikan sebagai suatu alat bukti yang valid (sah).

Testimonium de auditu dapat terjadi di pengadilan pada tingkat manapun. Oleh karena itu menurut hemat penulis, hakim disini harus cermat dan teliti dalam mendengarkan kesaksian dari para saksi yang dipanggil di dalam persidangan, jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusannya, hal ini tentunya akan berdampak negatif bagi keadilan yang diberikan oleh hakim. Untuk itu, secepat mungkin harus diambil tahapan-tahapan pencegahan, yakni dengan hakim dapat bertanya langsung kepada saksi apakah yang ia menerangkan peristiwa itu merupakan suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan dialami sendiri. Apabila nantinya ternyata yang diterangkan itu adalah suatu peristiwa pidana yang ia tidak dengar, lihat, dan dialami sendiri, sebaiknya dalam hal ini hakim secara tegas mengambil tindakan dengan membatalkan status kesaksiannya atau tidak perlu mendengar lebih lanjut keterangannya dan hakim dapat memerintahkan saksi *testimonium de auditu* tersebut keluar dari ruang sidang.

⁵⁸ Testimonium de auditu adalah kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain dan *Testimonium de auditu* ditolak sebagai suatu alat bukti. Lihat dalam Hukum Online, *Testimonium de auditu*, dalam <https://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 12 November 2018

Sehingga dengan demikian hakim dalam proses pembuktiannya dapat terhindar dari kesaksian de auditu, ini berarti juga hanya akan dihasilkan suatu kesaksian yang bernilai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 butir a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan hakim dalam putusannya.⁵⁹

d. Barang-barang Bukti

Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai apa itu barang bukti, namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyebutkan mengenai apa saja yang dapat dikatakan sebagai barang bukti yang dapat disita, diantaranya ialah :

- Benda atau tagihan yang berasal dari tersangkakan maupun terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari suatu tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- Benda atau barang yang telah dipergunakan oleh terdakwa secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

⁵⁹ *Ibid*, hal 130-131

- Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi proses penyelidikan tindak pidana;
- Benda khusus yang dibuat atau diperuntukkan dalam melakukan perbuatan tindak pidana;
- Benda atau alat lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;⁶⁰

Adanya barang bukti yang terungkap dalam persidangan akan menambah keyakinan hakim untuk menilai benar atau tidaknya perbuatan yang telah didakwakan kepada terdakwa, terlebih lagi hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa dan para saksi. Barang bukti ini juga ada dan cenderung dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.⁶¹

e. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang juga sering terungkap dalam proses persidangan ialah pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini semula terlihat dan terungkap di dalam surat dakwaan penuntut umum, yang kemudian digunakan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Di dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana selalu dihubungkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Yang mana

⁶⁰ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁶¹ *Ibid*, hal 134-135

dalam hal ini, penuntut umum dan hakim pun berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti mengenai apakah perbuatan dari terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang mana dirumuskan di dalam pasal peraturan hukum pidana. Berdasarkan atas Pasal 197 KUHP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pidana adalah, pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan.⁶²

2. Pertimbangan yang Bersifat Non-yuridis

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis, hakim pengadilan dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Sebagaimana diketahui pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup guna menentukan nilai-nilai keadilan baik bagi diri terdakwa dan korban tindak pidana tanpa didasari dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat dari segi aspek sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan non-yuridis yang dilakukan hakim pengadilan sebelum menjatuhkan putusannya dibutuhkan guna mencapai rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukumnya, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh terdakwa tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, tetapi faktor interen dan ekstern pelaku yang melatar belakangi pelaku tindak pidana dalam melakukan kejahatan atau perbuatan yang melanggar norma-norma di masyarakat, sehingga hal tersebut juga

⁶² *Ibid.*

harus menjadi bahan pertimbangan secara bijak oleh hakim yang mengadili suatu perkara pidana.⁶³

Menurut penulis aspek sosiologis juga berguna sebagai kajian latar belakang sosial mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana, aspek-aspek dari segi psikologis berguna untuk mengkaji dan melihat kondisi psikologis terdakwa pada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana. Sedangkan terkait kriminologinya diperlukan guna mengkaji sebab mengapa seseorang itu dapat melakukan tindak pidana.



⁶³ Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 20